

KEPEMIMPINAN VISIONER DAN IDEOLOGI LOKAL DALAM PIDATO PERDANA ANGELA IDANG BELAWAN

Eka Jaya Putra Hatika Embang

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: ekajayaputrahatikaembang@gmail.com

Abstrak

Pidato perdana kepala daerah merupakan instrumen strategis yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai wacana kebijakan yang mencerminkan nilai kepemimpinan dan arah pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna kepemimpinan dan arah kebijakan dalam pidato perdana Bupati Mahakam Ulu tahun 2025 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough. Data utama berasal dari teks pidato resmi yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Mahakam Ulu tanggal 6 Oktober 2025 dan didukung oleh literatur terkait kepemimpinan publik serta komunikasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato tersebut mengandung tiga dimensi utama: (1) dimensi teks menampilkan kepemimpinan visioner, etis, dan berorientasi pelayanan publik; (2) dimensi praktik diskursif menunjukkan peran pidato sebagai dokumen kebijakan hasil ko-produksi politik dan birokrasi; dan (3) dimensi praktik sosial menegaskan integrasi nilai budaya lokal seperti gotong royong dan simbol bahtera sebagai sumber legitimasi pemerintahan. Kesimpulannya, pidato perdana Bupati Mahakam Ulu berfungsi sebagai media komunikasi pemerintahan yang menyatukan bahasa, kekuasaan, dan kebijakan publik, sekaligus merepresentasikan model kepemimpinan kolaboratif dan transformasional berbasis nilai lokal dalam konteks otonomi daerah.

Kata Kunci: *Pidato Perdana, Komunikasi Pemerintahan, Mahakam Ulu*

Abstract

The inaugural speech of a regional leader serves as a strategic instrument that goes beyond ceremonial function, acting as a policy discourse that reflects leadership values and the direction of governance. This study aims to analyze the meaning of leadership and policy orientation in the inaugural speech of the Regent of Mahakam Ulu in 2025 using a descriptive qualitative approach with Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA). The primary data were drawn from the official speech delivered during the Mahakam Ulu Regional House of Representatives (DPRD) plenary session on October 6, 2025, supported by relevant literature on public leadership and governmental communication. The findings reveal three main dimensions: (1) the textual dimension highlights visionary, ethical, and service-oriented leadership; (2) the discursive practice dimension indicates the role of the speech as a policy document resulting from political-bureaucratic co-production; and (3) the social practice dimension underscores the integration of local cultural values such as mutual cooperation and the symbol of the "bahtera" (boat) as sources of governmental legitimacy. In conclusion, the inaugural speech of the Regent of Mahakam Ulu functions as a medium of governmental communication that unites language, power, and public policy, while representing a model of collaborative and transformational leadership grounded in local values within the context of regional autonomy.

Keywords: *Inaugural Speech, Governmental Communication, Mahakam Ulu.*

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, pidato pelantikan kepala daerah berfungsi sebagai instrumen penting untuk komunikasi kebijakan, mengartikulasikan visi, misi, dan program strategis pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Pidato ini bertindak sebagai platform untuk mengekspresikan nilai-nilai kepemimpinan publik, membangun legitimasi politik, dan menguraikan strategi kolaborasi antar lembaga di tingkat lokal. Pentingnya alamat tersebut digarisbawahi oleh peran mereka dalam membentuk wacana seputar bahasa, kekuasaan, dan praktik birokrasi, yang memerlukan studi ilmiah untuk sepenuhnya memahami kebijakan yang tertanam dan implikasinya. Analisis Wacana Kritis (CDA), sebagaimana diterapkan dalam berbagai penelitian, mengungkapkan bagaimana bahasa dalam pidato politik berfungsi sebagai alat kekuasaan dan pengaruh. Misalnya, analisis pidato kampanye dalam pemilihan gubernur Jawa Timur menyoroti penggunaan bahasa secara strategis untuk membangun citra pemimpin dan menegaskan hubungan kekuasaan, yang sangat penting untuk mendapatkan legitimasi publik (Ismail et al., 2025). Demikian pula, pidato Hari Kemerdekaan Jokowi dan pidatonya di Majelis Konsultatif Rakyat menunjukkan penggunaan pilihan linguistik untuk menekankan kepemimpinan, persatuan, dan kepercayaan publik, yang mencerminkan prioritas bangsa (Dharma, 2025). Kerangka otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan keterlibatan masyarakat, dengan kepemimpinan yang efektif menjadi Sangat penting untuk mewujudkan pencapaian pemerintahan yang efektif (Fernanda et al., 2023). Pidato pelantikan, oleh karena itu, menjadi media di mana kepala daerah dapat mengkomunikasikan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip ini, seperti yang terlihat dalam penggunaan tindakan pidato secara strategis untuk menegaskan otoritas dan memproyeksikan tujuan masa depan (Abdullahi & Shuaibu, 2025). Selain itu, dimensi budaya dan ideologis dari pidato-pidato tersebut, seperti yang dianalisis dalam pelantikan Prabowo, menyoroti peran retorika dalam membingkai identitas nasional dan wacana politik (Hariati, 2025). Integrasi elemen budaya lokal dan hubungan masyarakat yang kuat semakin meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah, menumbuhkan kepercayaan dan dukungan untuk program pemerintah. Dengan demikian, pidato pelantikan dalam sistem otonomi daerah bukan hanya pidato seremonial tetapi interaksi bahasa, kekuasaan, dan pemerintahan yang kompleks yang membutuhkan analisis yang cermat untuk memahami dampaknya terhadap arah kebijakan dan persepsi publik.

Pidato perdana Bupati Angela Idang Belawan di Kabupaten Mahakam Ulu menandai momen penting dalam lintasan pembangunan daerah, menekankan visi “Mahulu Melaju: Maju, Setara, dan Berkelanjutan” untuk tahun 2025-2030. Visi ini sejalan dengan upaya yang lebih luas di Indonesia untuk meningkatkan otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan, seperti yang disorot dalam berbagai studi. Kabupaten Mahakam Ulu, daerah otonom baru, menghadapi tantangan khas daerah tersebut, termasuk kebutuhan akan pembangunan yang adil dan struktur tata kelola yang lebih baik (Irawan et al., 2021). Fokus kawasan ini pada reformasi birokrasi, terutama melalui pengembangan infrastruktur dan SDM, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal (Embang, 2025). Selain itu, upaya desentralisasi di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan lokal dan pelayanan publik, sangat penting bagi pengembangan Mahakam Ulu, karena mereka menyediakan kerangka kerja untuk memperkuat tata kelola daerah dan mengurangi kesenjangan regional (Suriadi et al., 2024; Sunardi et al., 2024). Pidato Bupati Angela Idang Belawan, oleh karena itu, tidak hanya menetapkan agenda pembangunan tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kontinuitas dan inovasi dalam tata kelola, yang bertujuan untuk mengintegrasikan praktik berkelanjutan dan pertumbuhan yang adil dalam kerangka kebijakan kawasan. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Mahakam Ulu dapat secara efektif menavigasi kompleksitas otonomi regional dan berkontribusi pada tujuan nasional yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan (Irawan et al., 2021).

Tabel 1. Analisis Dimensi Teks Pidato Perdana Bupati Mahakam Ulu

Aspek Isu	Fenomena di Mahakam Ulu	Indikator Empiris dari Pidato	Implikasi Pemerintahan
Politik Lokal	Pergantian kepemimpinan daerah 2025	Pernyataan kesinambungan visi	Penguatan legitimasi dan stabilitas politik lokal
Pemerintahan Daerah	Perumusan RPJMD 2025-2030	Visi “Mahulu Melaju” dan delapan program aksi	Penegasan arah kebijakan jangka menengah
Komunikasi Publik	Pidato sebagai instrumen penyampaian visi	Retorika kolaboratif dan simbol gotong royong	Penguatan partisipasi dan transparansi pemerintahan

Sumber: Olahan data Peneliti, 2025

Eksplorasi pidato pelantikan sebagai bentuk wacana kebijakan pemerintah, khususnya di daerah perbatasan Indonesia seperti Mahakam Ulu, menghadirkan kesempatan unik untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menegosiasikan kekuasaan, nilai-nilai publik, dan legitimasi birokrasi. Kesenjangan penelitian ini signifikan karena penelitian sebelumnya terutama berfokus pada pidato politik tingkat nasional, seperti yang oleh Prabowo Subianto dan Joko Widodo, menggunakan kerangka kerja seperti Analisis Wacana Van Dijk dan Analisis Wacana Kritis Fairclough untuk mengungkap interaksi antara bahasa, kekuasaan, dan politik (Sutarman et al., 2024; Kurniawan et al., 2024). Analisis ini mengungkapkan bagaimana para pemimpin membangun citra mereka dan mengkomunikasikan agenda politik melalui pilihan linguistik strategis, seperti diksi inklusif dan strategi retorik, untuk mempromosikan persatuan nasional dan meringankan masalah politik (Harmoko & Purwaningrum, 2025). Kebaruan dalam memeriksa pidato pelantikan regional terletak pada mengintegrasikan dimensi linguistik dengan praktik diskursif dan sosial, yang mencerminkan gaya kepemimpinan lokal dan arah kebijakan regional. Pendekatan ini dapat diambil dari analisis wacana kritis pidato kampanye, yang menyoroti bagaimana bahasa berfungsi sebagai instrumen kekuasaan untuk membangun legitimasi publik dan mempengaruhi opini (Ismail et al., 2025). Selanjutnya, kerangka kerja sosio-kognitif yang digunakan dalam menganalisis pidato Jokowi menunjukkan bagaimana bahasa dapat membentuk persepsi publik dan memandu kebijakan dengan menekankan otoritas kepemimpinan dan komunikasi strategis (CONTESA & Surwandono, 2024). Dengan menerapkan kerangka analitis ini ke konteks regional, peneliti dapat lebih memahami bagaimana para pemimpin lokal di daerah perbatasan seperti Mahakam Ulu menggunakan pidato pelantikan untuk menegaskan otoritas mereka, menyelaraskan dengan nilai-nilai publik, dan membangun legitimasi birokrasi, sehingga berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang komunikasi politik dan pembangunan daerah di Indonesia.

Penggunaan bahasa dan simbol politik dalam pidato mengungkapkan bagaimana para pemimpin menggunakan bahasa untuk melegitimasi kekuasaan dan mempengaruhi persepsi publik. Konteks sosial-politik Mahakam Ulu, sebagai daerah otonom, memerlukan kebijakan yang memenuhi kebutuhan lokal sambil menyelaraskan dengan prioritas nasional. Integrasi nilai-nilai Pancasila, yang menekankan persatuan, keadilan, dan inklusivitas, sangat penting dalam mengatasi tantangan struktural dan budaya dalam pemerintahan (Rahaditya, 2024). Selain itu, faktor sosial-ekonomi, seperti pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik dan arah politik, karena mereka mempengaruhi persepsi masyarakat dan partisipasi dalam pemerintahan (Siyamsih, 2023.). Oleh karena itu, pidato Bupati kemungkinan mengartikulasikan visi strategis yang menyeimbangkan otonomi lokal dengan tujuan pembangunan nasional, memanfaatkan nilai-

nilai kepemimpinan dan strategi wacana untuk menumbuhkan kerangka pemerintahan yang kohesif dan progresif di Mahakam Ulu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Wacana Kritis (CDA) Norman Fairclough adalah pendekatan komprehensif yang meneliti hubungan rumit antara bahasa, kekuasaan, dan masyarakat. Model Fairclough didasarkan pada keyakinan bahwa wacana adalah bentuk praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial, menjadikannya alat yang ampuh untuk mengungkap ideologi tersembunyi dan dinamika kekuasaan dalam teks (Riyanti, 2023). Pendekatannya dicirikan oleh kerangka tiga dimensi yang mencakup analisis teks (mikrostruktural), praktik wacana (mesostruktural), dan praktik sosiokultural (makrostruktural) (Hermawan & Hamdani, 2023; Febriyanti & Sundari, 2022). Analisis teks berfokus pada fitur linguistik teks, seperti tata bahasa dan kosakata, untuk memahami bagaimana bahasa membangun makna dan mempengaruhi persepsi (Hermawan & Hamdani, 2023).

Praktek wacana meneliti proses produksi teks, diseminasi, dan konsumsi, menyoroti bagaimana proses-proses ini dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan sosial. Praktik sosiokultural mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas yang membentuk dan dibentuk oleh wacana, menekankan peran kekuasaan dan ideologi dalam interaksi ini. CDA Fairclough bersifat interdisipliner, mengambil dari linguistik, sosiologi, dan ilmu politik untuk memberikan analisis holistik dari wacana. Ini sangat efektif dalam menganalisis wacana neoliberal dan dampaknya terhadap masyarakat, karena mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan dan menantang struktur kekuasaan. Kritikus pendekatan Fairclough berpendapat bahwa pendekatan ini terkadang memprioritaskan motivasi politik daripada analisis linguistik, namun kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk mengungkapkan implikasi sosial-politik dari penggunaan bahasa.

CDA Fairclough tidak hanya alat metodologis tetapi juga kerangka teoritis yang mendorong keterlibatan kritis dengan teks untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah sosial dan mempromosikan perubahan sosial. Hal ini menjadikannya pendekatan yang berharga bagi para peneliti di berbagai bidang, termasuk studi media, politik, dan studi budaya, untuk mengeksplorasi bagaimana wacana membentuk dan dibentuk oleh norma dan nilai-nilai masyarakat.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, secara khusus memanfaatkan kerangka Norman Fairclough dari Analisis Wacana Kritis (CDA), sebuah metode yang secara konsisten diterapkan di berbagai konteks untuk mengeksplorasi interaksi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Kerangka kerja CDA Fairclough digunakan untuk membedah teks melalui tiga dimensi meliputi: analisis tekstual, praktik wacana, dan praktik sosial. Dalam lingkup penelitian ini, sumber data secara sistematis diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda, khususnya data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari teks pidato perdana Bupati Mahakam Ulu pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 6 Oktober 2025 yang diperoleh melalui dokumen resmi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Mahakam Ulu. Dokumen ini menjadi sumber utama karena berisi wacana kebijakan, nilai kepemimpinan, serta arah komunikasi pemerintahan yang menjadi fokus penelitian.

Sementara itu, data sekunder bersumber dari kumpulan literatur yang ada seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik kepemimpinan publik, komunikasi pemerintahan, dan Analisis Wacana Kritis. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat kerangka teori, membantu proses interpretasi, dan membandingkan hasil analisis dengan penelitian terdahulu. Bentuk data yang digunakan bersifat tekstual dan linguistik,

meliputi kalimat, paragraf, serta kutipan yang terdapat dalam pidato. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, dan menginterpretasikan teks pidato secara menyeluruh untuk memahami struktur wacana, pilihan bahasa, serta pesan yang dikandung di dalamnya. Kedua, studi kepustakaan (*library research*), yakni menelaah berbagai literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan untuk memperkuat analisis wacana dan menempatkan temuan penelitian dalam konteks akademik Ilmu Pemerintahan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Teks

Pidato perdana Bupati Mahakam Ulu memperlihatkan konstruksi bahasa yang sistematis dan penuh lapisan makna. Secara tekstual, pembukaannya dibangun melalui retorika moral dan religius yang kuat: *“membersihkan hati sembari memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa”*. Ungkapan ini bukan sekadar bentuk penghormatan seremonial, melainkan upaya membangun legitimasi etis dan spiritualitas kekuasaan. Dalam tradisi pemerintahan Indonesia, bahasa semacam ini berfungsi untuk menegaskan niat kepemimpinan yang bersih dan tulus, sekaligus menanamkan keyakinan bahwa kekuasaan bersumber dari nilai ketuhanan, bukan ambisi politik. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi wacana agama dalam hubungan kekuasaan modern, di mana bahasa agama digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mempengaruhi opini publik dengan menciptakan hubungan emosional dengan pendengar (Rizwan et al., 2025).

Penggunaan retorika agama dalam pidato politik bukan hanya seremonial tetapi upaya yang disengaja untuk mengakar kepemimpinan dalam nilai-nilai ilahi daripada ambisi politik (Rizwan et al., 2025). Pendekatan ini konsisten dengan strategi retorik yang diamati dalam konteks lain, seperti khotbah Gus Iqdam, yang menggunakan etos, pathos, dan logos untuk menumbuhkan hubungan dengan audiens dan membangun kredibilitas (Hakim & Mukhlis, 2025). Demikian pula, penggunaan perumpamaan dan narasi oleh Bediuzzaman Said Nursi dalam tulisannya menunjukkan bagaimana wacana agama dapat beresonansi secara mendalam dengan kecerdasan dan emosi penonton, memelihara kesadaran spiritual (Ibrahim et al., 2025).

Penggunaan strategis bahasa agama dalam konteks politik lebih lanjut dicontohkan dalam analisis wacana kritis pidato pelantikan Joko Widodo, yang mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk melegitimasi otoritas dan mengendalikan perilaku (Kurniawan et al., 2024). Hal ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam politik Indonesia, di mana narasi agama digunakan untuk membentuk persepsi dan mempengaruhi dukungan pemilih, seperti yang terlihat dalam janji kampanye calon bupati di Mesuji (Ghivari & Kosasih, 2024). Penggunaan wacana agama dalam pidato politik dengan demikian berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara para pemimpin dan masyarakat multikultural Mahakam Ulu, menegaskan niat kepemimpinan yang bersih dan tulus sambil memperkuat keyakinan bahwa kekuasaan berasal dari nilai-nilai salah (Rizwan et al., 2025; Ghivari & Kosasih, 2024).

Selanjutnya, aspek retorika repetitif seperti *“Kerja Keras! Kerja Cerdas! Kerja Tuntas!”* menandai strategi performatif dalam membangun citra kepemimpinan yang berorientasi kinerja. Pola pengulangan tiga kata dengan irama fonetik serupa menciptakan efek persuasi dan penegasan karakter pemimpin yang energik, disiplin, dan berorientasi hasil. Teknik ini sejalan dengan kerangka analisis wacana Fairclough, yang mengidentifikasi pengulangan seperti itu sebagai strategi penekanan tekstual, secara efektif menegaskan posisi ideologis melalui bentuk-bentuk linguistik yang mudah diinternalisasi. Pengulangan kata-kata dengan ritme fonetik yang serupa tidak hanya menciptakan efek persuasif dan menegaskan tetapi juga memperkuat memori publik dan menanamkan slogan-slogan pemerintah. Pendekatan ini terbukti dalam berbagai konteks, termasuk kampanye politik dan teks swadaya,

di mana pengulangan digunakan untuk memanipulasi makna dan membangkitkan respons emosional dari pendengar (Sunarsih et al., 2024).

Dalam kampanye politik, fitur gaya seperti sajak, aliterasi, dan diksi khusus digunakan untuk memperkuat pesan kampanye dan branding pribadi, yang bertujuan membujuk dan melibatkan konstituen secara emosional, terutama kaum muda (Sunarsih et al., 2024). Selain itu, Pembicara publik yang karismatik juga memanfaatkan pengulangan sebagai bagian dari konstruksi retorik mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan menarik perhatian, menunjukkan bahwa karisma dapat dikembangkan melalui praktik teknik retorika yang disengaja (Wanjari & Ahmad, 2025). Dalam presentasi bisnis, perangkat retorik seperti metafora dan perumpamaan digunakan untuk menekankan ide-ide utama dan melibatkan audiens, menyoroti pentingnya strategi retorik dalam komunikasi yang efektif (Faith & Nugroho, 2024). Secara keseluruhan, penggunaan pengulangan secara strategis dalam retorika di berbagai domain menggarisbawahi kekuatannya dalam membentuk persepsi publik dan memperkuat posisi ideologis.

Pada bagian tengah pidato, visi, misi, dan program prioritas tampil sebagai teks kebijakan yang mengandung struktur simbolik, ideologis, dan teknokratis. Frasa “Mahulu Melaju, Maju, Merata, dan Berkelanjutan” menunjukkan penggunaan gaya paralelisme dengan pola fonetik yang harmonis, seperti yang dibahas dalam studi paralelisme sebagai mekanisme latar belakang (Dzhusupov, 2024). Teknik linguistik ini tidak hanya menciptakan pola fonetik yang harmonis tetapi juga berfungsi untuk memperkuat identitas kolektif, menggambarkan Mahulu sebagai entitas yang dinamis dan progresif. Penggunaan bahasa seperti itu dalam pidato politik adalah strategi umum untuk menyampaikan pesan ideologis dan membangun hubungan dengan audiens, seperti yang terlihat dalam analisis pidato politik oleh para pemimpin seperti John Dramani Mahama dan Narendra Modi, yang menggunakan struktur linguistik untuk menanamkan implikasi ideologis dan menumbuhkan kepercayaan publik (Addae et al., 2023; Sharma & Kumar, 2024).

Bentuk deklaratif dari lima misi pemerintah, seperti “*Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,*” mencerminkan perpaduan bahasa teknokratis dan idealisme sosial, karakteristik teks kebijakan yang menyeimbangkan visi politik dengan arahan administratif (Mashudi & Kuntoro, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan temuan tentang peran bahasa dalam identitas politik dan persepsi publik, di mana bahasa berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dan penanda identitas (Kizi, 2024). Selain itu, penggunaan paralelisme dan perangkat retorik lainnya dalam wacana politik, seperti yang disorot dalam analisis pidato Barack Obama dan Benjamin Netanyahu, menggarisbawahi dimensi simbolis dan ideologis retorika politik, yang sangat penting untuk membentuk persepsi publik dan membenarkan tujuan politik (Moraru, 2022; Saleem & Irshad, 2025). Dengan demikian, frasa dan misi yang menyertainya dalam pidato berfungsi sebagai genre kebijakan yang mengintegrasikan struktur simbolis, ideologis, dan teknokratis untuk mengartikulasikan narasi politik yang kohesif dan menarik.

Lebih jauh, delapan program aksi Mahulu Melaju seperti “*Membangun Mahulu untuk Semua*”, “*Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Pengangguran*”, atau “*Transformasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik*” menunjukkan transisi gaya bahasa dari simbolik menuju administratif-instruksional. Pola kalimat imperatif seperti “*Melanjutkan dan menambah program...*”, “*Menuntaskan pembangunan...*”, “*Menginstruksikan kepada OPD...*” merupakan bentuk *directive discourse* yang khas dalam teks pemerintahan. Konsep Fairclough tentang realisasi tekstual kekuasaan kelembagaan terbukti di sini, di mana para pemimpin memmanifestasikan kekuasaan melalui bahasa yang mengarahkan tindakan sosial daripada melalui dominasi terang-terangan (Ismail & Husin, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan transformasi birokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Transformasi, yang

dimulai pasca-Reformasi 1998, berfokus pada pengurangan korupsi dan peningkatan pelayanan publik melalui inisiatif seperti *e-government* dan pengembangan sumber daya manusia (Zsazsa & Nasution, 2023). Era digital semakin mempercepat transformasi ini dengan mempromosikan digitalisasi dan layanan berbasis teknologi, yang meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas, meskipun tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan data tetap ada. Selain itu, transformasi administrasi publik melibatkan pendekatan inovatif untuk memenuhi harapan masyarakat akan layanan berkualitas, meskipun menghadapi resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan teknologi (Utami, 2023). Bahasa imperatif yang digunakan dalam teks-teks pemerintah berfungsi sebagai alat strategis bagi para pemimpin untuk memproyeksikan otoritas dan memandu tindakan sosial, seperti yang terlihat dalam penggunaan tindakan deklaratif dan komisif Gubernur Abba Kabir Yusuf untuk menegaskan otoritas politik dan berkomitmen untuk tujuan masa depan (Abdullahi & Shuaibu, 2025).

Strategi linguistik ini sangat penting dalam konteks administrasi publik Indonesia, yang berada pada titik kritis yang membutuhkan transformasi fundamental untuk mengatasi patologi birokrasi internal dan tekanan eksternal untuk desentralisasi dan efisiensi ekonomi (Sulistyowati et al., 2025). Efektivitas transformasi ini semakin ditingkatkan dengan partisipasi aktif masyarakat, yang memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik (Kusuma, 2024). Secara keseluruhan, penggunaan wacana direktif dalam teks-teks pemerintah merupakan cerminan dari sifat pemerintahan yang berkembang, di mana bahasa adalah alat yang ampuh untuk memberlakukan perubahan kelembagaan dan mendorong sistem layanan publik yang responsif dan efisien.

Tabel 2. Analisis Dimensi Teks Pidato Perdana Bupati Mahakam Ulu

Elemen Linguistik	Contoh dalam Pidato	Fungsi Wacana	Interpretasi Akademik
Bahasa religius–moral	“membersihkan hati”, “kasih dan karunia”, “syukur ke hadirat Tuhan”	Legitimasi etis dan spiritualitas kepemimpinan	Bahasa berfungsi menanamkan nilai moral dan religius untuk memperkuat kepercayaan publik.
Repetisi performatif	“Kerja Keras! Kerja Cerdas! Kerja Tuntas!”	Penegasan ideologi etos kerja dan daya ingat publik	Struktur ritmis memperkuat identitas pemimpin produktif dan birokrasi kinerja tinggi.
Metafora simbolik	“bahtera yang mengarungi samudra luas”	Membangun imajinasi kolektif dan solidaritas sosial	Pemerintahan dibingkai sebagai perjalanan kolektif; bahasa berfungsi sebagai alat kohesi sosial.
Bahasa teknokratis	“menyusun roadmap e-government”	Rasionalisasi dan modernisasi kebijakan publik	Menunjukkan orientasi reformasi birokrasi dan tata kelola digital sebagai wacana kemajuan.
Paralelisme ideologis (visi)	“Mahulu Melaju, Maju, Merata, dan Berkelanjutan”	Representasi ideologi	Struktur paralel membentuk identitas daerah yang

ARTIKEL

		pembangunan kolektif	progresif, egaliter, dan berkelanjutan.
Bahasa direktif (program prioritas)	“Melanjutkan dan menambah program...”, “Menginstruksikan kepada OPD...”	Instrumen legitimasi dan otoritas kebijakan	Bahasa perintah digunakan untuk mengatur tindakan birokrasi secara terukur dan hierarkis.

Sumber: Olahan data Peneliti, 2025

2. Dimensi Diskursif

a. Produksi (*Co-Production*) dan Orkestrasi Kelembagaan

Proses penyusunan pidato Bupati, sebagaimana dijelaskan, mencerminkan upaya kolaborasi antara pimpinan daerah dan tim teknis, menyelaraskan visi politik Bupati dengan standar kelembagaan. Proses ini tidak unik dan dapat dilihat dalam berbagai konteks politik di mana pidato berfungsi sebagai media untuk membangun ideologi dan citra politik, seperti yang ditunjukkan dalam analisis pidato pelantikan Joko Widodo, yang dibuat untuk melegitimasi otoritasnya dan selaras dengan ideologi politik (Kurniawan et al., 2024; Lestari, 2021). Isi pidato, menekankan kepentingan publik dan pengabdian kepada masyarakat, mencerminkan tanggung jawab konstitusional yang memandu komunikasi politik, mirip dengan strategi yang digunakan oleh Bupati Banggai petahana untuk meningkatkan elektabilitas melalui narasi yang berfokus pada keberhasilan pembangunan dan keterlibatan masyarakat (Setiadi et al., 2024). Dimasukkannya penghormatan kepada para pemimpin sebelumnya dalam pidato adalah pendekatan komunikasi strategis untuk menekankan kontinuitas dan rasa hormat, menumbuhkan rasa stabilitas dan kepercayaan publik, mirip dengan narasi politik yang dibangun dalam pidato kampanye untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik (Ismail et al., 2025).

Selain itu, penyusunan pidato tersebut melibatkan keseimbangan yang cermat antara kepentingan politik dan prinsip- hukum, seperti terlihat dalam penyusunan peraturan daerah, yang memerlukan keselarasan dengan kebutuhan lokal dan standar nasional (Fitria et al., 2024; Ramdani et al., 2025). Proses ini menunjukkan dinamika desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas, di mana pemerintah daerah ditugaskan untuk menyelaraskan kebijakan mereka dengan kebutuhan masyarakat sambil mempertahankan praktik tata kelola yang baik (Fernanda et al., 2023). Secara keseluruhan, proses penyusunan pidato adalah interaksi kompleks dari sensitivitas politik, ketepatan teknis, dan kepatuhan terhadap protokol pemerintah, memastikan bahwa wacana selaras dengan tujuan politik dan mandat konstitusional.

b. Distribusi Institusional dan *Genre Chain* Kebijakan

Distribusi pidato politik dalam Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, seperti yang dijelaskan, mencerminkan integrasi yang canggih dari retorika politik ke dalam proses administrasi dan pembuatan kebijakan, memastikan bahwa visi dan misi yang diartikulasikan dalam pidato dioperasionalkan melalui struktur tata kelola daerah. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan regional yang efektif, yang menekankan pentingnya menerjemahkan tujuan politik ke dalam rencana yang dapat ditindaklanjuti yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup (Akhaminov, 2023). Proses menanamkan pidato ke dalam dokumen resmi seperti RPJMD dan KUA-PPAS, dan kemudian ke dalam anggaran, mencerminkan kerangka kelembagaan yang diamati dalam kebijakan pembangunan daerah, seperti PNDR Brasil, yang juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan regional melalui perencanaan dan penganggaran terstruktur (Deponti, 2024). Penggabungan Program 100 Hari ke dalam Anggaran Amandemen 2025 menyoroti tantangan penyederhanaan kebijakan yang berlebihan, di mana tujuan jangka pendek diprioritaskan, berpotensi dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang (Purna, 2024).

Pendekatan ini mengingatkan pada praktik kebijakan regional Uni Eropa, di mana komunikasi dan interaksi antara badan-badan pemerintah dan publik sangat penting untuk menyelesaikan masalah lokal dan memastikan implementasi kebijakan yang kohesif (Komarova et al., 2023). Selanjutnya, transformasi pidato menjadi pedoman birokrasi mencerminkan penggunaan pengisi suara intertekstual dalam pidato anggaran, yang melegitimasi tindakan pemerintah dengan menanamkannya dalam narasi ekonomi dan politik yang lebih luas (Rajandran, 2023). Tindakan pidato yang digunakan dalam pidato politik semacam itu, seperti yang terlihat dalam pidato Presiden Joko Widodo, berfungsi untuk menegaskan otoritas dan menumbuhkan kepercayaan publik, sehingga memperkuat konsekuensi administratif pidatonya (Ilinawati et al., 2025; Contesa & Surwandono, 2024). Integrasi komprehensif wacana politik ke dalam kerangka administrasi ini memastikan bahwa arah pembangunan tidak hanya dikomunikasikan tetapi juga diterapkan secara sistematis, sehingga meningkatkan efektivitas tata kelola dan akuntabilitas (Voutilainen, 2023).

c. Konsumsi dan Re-Kontekstualisasi Oleh Aktor

Pidato secara performatif memanggil *audiens* kelembagaan (DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, kecamatan, pemerintahan kampung) untuk mengambil peran, menandai bahwa “konsumsi” wacana yang dituju adalah tindakan kolektif partisipasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas unit. Ajakan eksplisit untuk “menjadikan perjalanan lima tahun sebagai gerakan bersama” menunjukkan desain konsumsi yang berorientasi implementasi: wacana dipahami, disetujui, lalu dikonkretkan oleh aktor-aktor eksekutor dalam struktur pemerintahan. Ini sejalan dengan konsep tindakan pidato direktif, yang dirancang untuk mempengaruhi dan memobilisasi tindakan, seperti yang terlihat dalam analisis pidato presiden di mana arahan digunakan untuk memetakan tugas dan menetapkan standar layanan, mengubah pendengar menjadi pelaksana aktif (Azwar & Minto, 2023). Analisis pragmatis dokumen pendidikan lebih lanjut mendukung hal ini dengan menyoroti bagaimana suara dan agensi kelembagaan dibangun melalui tindakan pidato direktif, yang sering disertai dengan asumsi dan pembenaran implisit untuk menstabilkan kepatuhan dan memandu tindakan (da Silva, 2025).

Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, pentingnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola daerah menggarisbawahi perlunya tindakan kolektif, meskipun tingkat partisipasi saat ini masih rendah (Fridiyanti & Kurniawan, 2023). Efektivitas pemerintah subnasional dalam mengatasi masalah integrasi regional juga bergantung pada peningkatan koordinasi dan interaksi antara berbagai tingkat pemerintahan, yang dapat ditingkatkan melalui digitalisasi dan pengembangan profesional. Studi tentang arahan aturan dalam proyek-proyek infrastruktur Belanda menggambarkan bagaimana aturan kelembagaan dapat mempengaruhi tindakan kolektif dengan mengarahkan proses pengambilan keputusan dan mengelola timbal balik, sehingga mengubah tindakan sektoral menjadi upaya kolektif (Neef et al., 2023). Selain itu, kinerja komunikatif Kantor Staf Presiden di Indonesia menunjukkan perlunya koordinasi dan pelaksanaan tugas yang jelas untuk menghindari fungsi yang tumpang tindih dan memastikan komunikasi kebijakan yang efektif (Nurlita & Heryanto, 2022). Wawasan ini secara kolektif menunjukkan bahwa sifat arahan pidato dirancang untuk mendorong gerakan bersama dengan mengubah audiens institusional menjadi peserta aktif dalam pelaksanaan mandat pemerintah, sehingga memfasilitasi upaya terkoordinasi dan kolaboratif di berbagai unit.

d. Interdiskursivitas: Pencampuran Wacana Politik, Administratif, Moral, Budaya

Pidato pelantikan Bupati Mahakam Ulu mencontohkan konsep interdiskursivitas dengan memadukan wacana politik, moral, dan sosial untuk membangun legitimasi, arah kebijakan, dan penerimaan sosial. Pendekatan ini konsisten dengan temuan Ruth Amossy, yang menekankan peran argumentasi dalam membangun legitimasi dan otoritas politik, menyoroti bagaimana para pemimpin menggunakan wacana untuk menavigasi konteks sosial-politik dan melegitimasi posisi mereka (Amossy, 2022). Seruan pidato untuk rekonsiliasi, seperti “*Diskusi politik sudah berakhir, saatnya bekerja untuk kesejahteraan bersama,*” berfungsi tidak hanya

sebagai daya tarik moral tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menjembatani ketegangan pasca-pemilihan, menumbuhkan suasana damai di antara berbagai kelompok politik. Ini sejalan dengan analisis wacana politik sebagai alat untuk memperkuat ideologi dan membentuk opini publik, seperti yang dibahas oleh Iryna Holubovska, yang mencatat bahwa pidato perdana sering mengartikulasikan nilai-nilai sosial-politik dan etika untuk mempengaruhi orientasi kognitif dan nilai pemilih (Holubovska, 2024).

Selain itu, bahasa pidato yang menenangkan menempatkan Bupati sebagai pemimpin pemersatu, siap merangkul semua pihak dalam kerja kolektif, yang merupakan strategi umum dalam wacana politik untuk meningkatkan legitimasi dan otoritas seorang pemimpin, seperti yang terlihat dalam pidato para pemimpin lain seperti Presiden Prabowo dan Joko Widodo, yang menggunakan bahasa untuk membingkai identitas nasional dan tujuan kolektif (Fidiyanti et al., 2025; Kurniawan et al., 2024). Pendekatan ini juga didukung oleh kerangka teoritis Jürgen Habermas, yang menggarisbawahi pentingnya komunikasi rasional dan inklusif dalam melegitimasi kekuasaan politik, menunjukkan bahwa wacana semacam itu dapat membuka peluang untuk pengambilan keputusan yang lebih rasional dan peningkatan legitimasi (Zakiyah et al., 2024). Secara keseluruhan, pidato Bupati secara efektif memanfaatkan interdiskursivitas untuk membangun landasan bagi agenda pemerintahan yang inklusif, mencerminkan tren yang lebih luas dalam wacana politik yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, dan melegitimasi kepemimpinan melalui komunikasi strategis (Kumar et al., 2025).

Kedua, wacana administratif dan teknokratis muncul kuat dalam penyusunan visi, misi, dan delapan program aksi. Bentuk kalimatnya bersifat deklaratif dan operasional, misalnya “Meningkatkan kualitas SDM melalui beasiswa,” “Menuntaskan pembangunan infrastruktur,” hingga “Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).” Bahasa seperti ini merupakan wacana prosedural yang dirancang untuk diproses oleh birokrasi: konkret, terukur, dan siap diintegrasikan ke dalam sistem kerja OPD. Di sisi lain, istilah seperti “roadmap e-government” dan “pengawasan berbasis teknologi informasi” memperkenalkan unsur teknokratis-digital, menandakan upaya modernisasi pemerintahan melalui penerapan prinsip transparansi dan efisiensi berbasis teknologi.

e. *Genre Mixing, Voice Management, dan Perangkat Pengikat Implementasi*

Pidato perdana Bupati Mahakam Ulu memperlihatkan perpaduan berbagai genre wacana yang saling melengkapi dan berfungsi untuk memperkuat efektivitas pesan sekaligus pelaksanaannya. Unsur seremonial hadir melalui sapaan protokoler dan salam lintas agama yang menegaskan rasa hormat terhadap tatanan formal dan keberagaman masyarakat, sementara unsur programatik tampak dalam penyampaian visi, misi, serta delapan program aksi yang menjadi kerangka arah pembangunan daerah. Di sisi lain, bagian instruksional ditandai oleh kalimat-kalimat imperatif seperti “Menginstruksikan kepada seluruh OPD...” yang menjadikan pidato bukan sekadar pernyataan politik, tetapi juga panduan operasional bagi birokrasi, sedangkan unsur kultural melalui pantun dan ungkapan lokal menegaskan kedekatan pemimpin dengan nilai-nilai masyarakat Mahulu. Perpaduan ini memungkinkan pengelolaan suara kepemimpinan secara dinamis: Bupati tampil sebagai figur moral, perancang kebijakan, administrator, sekaligus anak daerah yang berakar pada budaya lokal. Lebih dari itu, penggunaan bahasa perintah dan tenggat waktu, seperti target “tuntas Desember 2025” serta kewajiban OPD menayangkan SOP, standar biaya, dan fasilitas layanan, berfungsi sebagai perangkat pengikat implementasi, memastikan pesan pidato menubuh dalam tindakan nyata. Dengan demikian, teks ini membentuk rantai wacana yang utuh dari ucapan → dokumen → prosedur → kinerja, menjadikan pidato bukan hanya simbol legitimasi, tetapi juga alat kendali dan panduan kerja birokrasi menuju tata kelola yang konkret dan terukur.

3. Dalam Dimensi Praktik Sosial

Pada level praktik sosial, visi, misi, dan program prioritas merepresentasikan ideologi dan struktur nilai masyarakat Mahakam Ulu itu sendiri. Misalnya, visi “*Mahulu Melaju, Maju, Merata, dan Berkelanjutan*” mengandung tiga lapisan makna sosial:

- a. “Maju” → menandai semangat modernisasi daerah perbatasan (nilai kemajuan).
- b. “Merata” → menandai tuntutan keadilan spasial antara kampung hulu dan hilir (nilai pemerataan sosial).
- c. “Berkelanjutan” → menandai kesadaran ekologis dan tanggung jawab lintas generasi (nilai keberlanjutan).

Sementara itu, program prioritas seperti beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu, Dana RT dan Dana Kampung, atau *roadmap e-Government* adalah bentuk praktik sosial konkret dari nilai-nilai yang dikonstruksikan dalam teks. Dalam istilah Fairclough, hal ini menunjukkan bagaimana bahasa kebijakan mengalir menjadi tindakan sosial, teks menjadi praksis pemerintahan yang mempengaruhi struktur sosial, birokrasi, dan kehidupan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pidato perdana Bupati Mahakam Ulu tahun 2025 merepresentasikan konstruksi kepemimpinan visioner, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik, sekaligus menjadi instrumen komunikasi kebijakan yang strategis bagi arah pemerintahan daerah. Hasil analisis wacana kritis Fairclough menunjukkan bahwa pada dimensi teks, pidato tersebut memuat nilai moralitas, kesinambungan pembangunan, dan semangat kolektif yang menegaskan legitimasi kepemimpinan etis; pada dimensi praktik diskursif, pidato berfungsi sebagai dokumen kebijakan awal yang dihasilkan melalui ko-produksi politik dan teknokratik antara Bupati dan birokrasi daerah; sedangkan pada dimensi praktik sosial, bahasa dan simbol lokal seperti “bahtera” dan “gotong royong” digunakan untuk menanamkan ideologi kebersamaan dan memperkuat kohesi sosial dalam konteks multikultural Mahakam Ulu. Integrasi ketiga dimensi ini membentuk model kepemimpinan kolaboratif dan transformasional yang memadukan kekuatan moral, kultural, dan administratif dalam membangun legitimasi pemerintahan. Dengan demikian, pidato perdana tidak hanya berperan sebagai alat retorika politik, tetapi juga sebagai arena pembentukan makna kebijakan dan nilai publik yang berakar pada budaya lokal serta mendukung implementasi visi “Mahulu Melaju” dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, U., & Shuaibu, L. (2025). Declarative and Commissive Acts an Governor Abba Kabir Yusuf’s 2023 Inaugural Address. *Journal of Arts and Sociological Research*, 09(6), 187-202.
- Addae, A., Danquah, G. K., Hamidu, A., & Adjei-Yeboah, K. (2023). Ideological discursive structures in political speeches: A critical discourse analysis of selected speeches of Mr. John Dramani Mahama. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(3), 1314-1333.
- Akhaminov, T. B. (2023). Key Aspects of Effective Regional Economic Policy Implementation. *Ekonomika I Upravlenie Problemy Resheniya*, 12/15(141), 12-16.
- Amossy, R. (2022). Construire la légitimité et l’autorité politiques en discours. *Argumentation et analyse du discours*, (28).
- Azwar, R., & Minto, D. W. (2022). Tindak Tutur Direktif Dalam Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD Tahun 2021. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(6), 8084-8095.

- Contesa, Y. (2024). Discourse analysis of Joko Widodo's last state of the nation address 2024. *Jurnal Studi Komunikasi*, 8(3), 734-747.
- da Silva, R. O. (2025). Voz, Dever E Agência Docente: Leitura Pragmática De Um Documento Entregue A Instrutores Para O Desenvolvimento De Práticas Na Formação Profissional. *Aurum Editora*, 878-888.
- Deponti, C. M., Travassos, L. R. F. C., Tartaruga, I. G. P., Perafan, M. E. V., & Rambo, A. G. (2024). Políticas de desenvolvimento regional no Brasil: uma análise da PNDR e da PNOT= Regional development policies in Brazil: an analysis of PNDR and PNOT.
- Dharma, Y. P. (2025). The Study of Speech Acts of Joko Widodo's Speech in Annual Session People's Consultative Assembly (MPR) 2024. *EJI (English Journal of Indragiri): Studies in Education, Literature, and Linguistics*, 9(1), 1-14.
- Dzhusupov, N. (2024). Parallelism as a Foregrounding Mechanism and a Model of Text Organization. *Foreign Languages in Uzbekistan*, 125-138. <https://doi.org/10.36078/1715850556>
- Embang, E. J. P. H., Saleh, M. H., & Jamal, M. (2025). Reformasi Birokrasi Berbasis Good Governance pada Kinerja Protokol Mahakam Ulu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(3), 483-504.
- Faith, C., & Nugroho, A. H. D. (2024). Rhetorical Devices Used To Make Emphasis In Brian Tracy's Talk "How To Build A Business That Works". *K@ TA KITA Учпедумелу: Petra Christian University*, 12(3), 307-312.
- Febriyanti, R. H., & Sundari, H. (2022). The Resignation Reporting News of The President's Staff Via Online Media: A Norman Fairclough Critical Discourse Analysis. *Scope: Journal of English Language Teaching*, 6(2), 87. <https://doi.org/10.30998/scope.v6i2.11770>
- Fernanda, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2409-2418.
- Fidiyanti, M., Suhartono, S., & Sodik, S. (2025). Political Discourse Space: Critical Cognitive Analysis on Inauguration Speech of President Prabowo. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 5, 1645-1645.
- Fitria, R. A., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 833-853.
- Fridiyanti, Y. N., & Kurniawan, A. W. (2023). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mekanisme Perencanaan Pembangunan Di Era Desentralisasi. *Spektrum*, 20(1), 44-54.
- Ghivari, R. W., & Kosasih, A. (2024). Konstruksi Narasi Surga: Analisis Wacana Kritis Berita Janji Kampanye Calon Bupati Mesuji. *Icon: Islamic Communication and Contemporary Media Studies*, 3(2), 161-169.
- Hakim, L., & Mukhlis, Z. (2025). Metaretorika Dakwah: Analisis Ceramah 'Rutinan Malam Selasa' Gus Iqdam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 15(1), 136-158.
- Hariati, P., & Purwarno, P. (2025). Ideological rhetoric: a critical discourse analysis of Prabowo's first inauguration speech. *JOALL (Journal of Applied Linguistics and Literature)*, 10(1), 136-156. <https://doi.org/10.33369/joall.v10i1.37663>
- Harmoko, D. D., & Purwaningrum, P. W. (2025). Symbolisme Politik dan Narasi Keberlanjutan: Studi Analisis Wacana Kritis Pidato Presiden RI Ke 7 Joko Widodo. *JURNALISTRENDI: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan*, 10(1), 54-66. <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v10i1.2415>
- Hermawan, A. D., & Hamdani, A. (2023). Critical Discourse Analysis of Norman Fairclough on Online Media Reporting About The Rohingya Refugee Crisis. *MATAPENA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(02), 549-557.

- Holubovska, I. (2024). Presidential Inaugural Speech As A Discursive Manifestation Of Ideologemes Reflecting Social And Political Values. *MOVOZNAVSTVO*, 336(3), 75–86. <https://doi.org/10.33190/0027-2833-336-2024-3-005>
- Ibrahim, I., Mohamad Nazeer, S. H., Sahimi, M., Mohamad Khassim, N. A., & Ozata, S. (2025). The Rethorical Style of Bediuzzaman Said Nursi in Discussing Faith Through Kitab Risalah Kalimah-Kalimah Kecil. *International Journal of Law, Government and Communication*, 10(40), 303–313. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.1040022>
- Irawan, B., Akbar, P., Purnomo, E. P., & Nurmandi, A. (2021). Development planning to accelerate Sustainable Development Goals (SDGs) in Mahakam Ulu Districts as a new autonomous region. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 34(2), 184. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i22021.184-195>
- Ismail, M., Asrori, H., & Brillian, S. (2025). Strategi Kekuasaan Politik dalam Pidato Kampanye Paslon No. 3 Tri Rismaharini & Zahrul Azhar Asumta di Pilgub Jatim 2024: Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 4(09), 1598-1612.
- Ismail, S., & Husin, N. (2024). Discourse Strategies in the ‘Membangun Negara MADANI: Visi dan Kerangka Reformasi’ by Anwar Ibrahim. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(8), 3491-3506.
- Kizi, I. F. S. (2024). Linguistic Personality in Uzbek Presidential Political Speeches. *International Journal of Advance Scientific Research*, 4(8), 20–25. <https://doi.org/10.37547/ijasar-04-08-03>
- Komarova, K., Dynnyk, I., Shchurevych, L., Lazebna, I., & Serhienko, E. (2023). Regional Policy as a Component of Information And Communication Interaction of Local Self-Government Bodies with the Public: The Experience of EU Countries. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*, 13(2), 135-143.
- Kumar, M., Singh, A. K., & Das, S. S. (2025). *Inclination and Accession of Political Discourse*.
- Kurniawan, V., Sukatman, S., & Widjajanti, A. (2024). Pidato Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-X: Kajian Wacana Kritis Norman Fairclough. *Lingua Skolastika*, 3(2), 77-93.
- Kusuma, F. K. (2024). Efektivitas Transformasi Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Serta Masyarakat yang Partisipatif Menuju Pelayanan Publik Unggul. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3), 1148–1155. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2042>
- Lestari, M. (2021). Konstruksi Ideologi dan Citra Politik di Balik Naskah Pidato Kepresidenan Pertama Joko Widodo. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 209-214.
- Mashudi, M., & Kuntoro, K. (2025). Politik Bahasa: Dinamika Kekuasaan, Identitas, dan Perencanaan Bahasa. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 5(2), 259-271. <https://doi.org/10.51878/academia.v5i2.6298>
- Moraru, V. (2022). Presidential rhetoric as source of symbolic politics. *Moldoscoapie*, 3(94), 129–143. [https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.3\(94\).10](https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.3(94).10)
- Neef, R., Busscher, T., Verweij, S., & Arts, J. (2023). How rule directions influence actors to achieve collective action: an analysis of Dutch collective infrastructure decision-making. *European Planning Studies*, 31(8), 1612–1633. <https://doi.org/10.1080/09654313.2022.2085030>
- Nurlita, R., & Heryanto, G. G. (2023). Komunikasi Kebijakan Infrastruktur Era Pemerintahan Joko Widodo: Studi Kasus Di Kantor Staf Presiden (KSP). *Jurnal Audience*, 5(2), 134-151.

- Purna, Z. A. (2024). Policy Oversimplification in the First 100 Days Post-Regional Head Elections. *Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)*, 1(3), 1–12. <https://doi.org/10.69816/jgd.v1i3.42323>
- Rahaditya, R. (2024). Pemimpin dan Tantangan Penerapan Ideologi Pancasila Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Baru. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 4(2), 91-99.
- Rajandran, K. (2023). Voices of Economic Competence: Legitimizing the Government in Federal Budget Speeches. In *Discursive Approaches to Politics in Malaysia: Legitimising Governance* (pp. 33-51). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Ramdani, T. S. L., Sagita, N. I., & Afrilia, U. A. (2025). Proses Penyusunan Rancangan Produk Hukum Jawa Barat Yang Mengaturketentuan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 8(02), 976-992.
- Riyanti, E. D. (2023). The Philosophical Basis of Critical Discourse Analysis. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 9(2), 371-394.
- Rizwan, M., Ali, P., & Adnan, H. (2025). The Politics of Faith and the Strategic Use of Religious Discourse in Modern Power Relations. *Journal of Applied Linguistics and TESOL (JALT)*, 8(3), 2276-2287.
- Saleem, S., & Irshad, I. (2025). Power, Ideology, and Rhetoric: A Critical Discourse Analysis of Prime Minister Benjamin Netanyahu's 2024 UN Speech. *Journal of Applied Linguistics and TESOL (JALT)*, 8(3), 1129-1137.
- Setiadi, M. D., Sadono, T. P., & Tachopisalwong, A. (2024). Political Communication of the Incumbent Regent of Banggai to Increase Electability in the 2024 Banggai Regional Election Contestation. *ASPIRATION Journal*, 5(2), 114-132.
- Sharma, P., & Kumar, V. Communicative Competence in the Select Speech of Shri Narendra Modi: A Linguistic Analysis. *Evolution Studies in Imaginative Culture*, 8(1), 1015-1023.
- Siyamsih, D. (2024). Persepsi Masyarakat Tentang Menafsirkan Arah Politik dan Kebijakan Publik. *Socious Journal*, 1(1), 1-8.
- Sulistiyowati, S., Maharani, D. N., Husin, U., & Syaidrawan, S. (2025). Sistem Administrasi Negara sebagai Pilar Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5719–5730. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.6421>
- Sunardi, S., Syafiq, A. N., & Hernanda, T. (2024). Implementasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal De jure Muhammadiyah Cirebon*, 8(2), 59–71. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1>
- Sunarsih, S., Rohman, T. N., Br Halawa, M. V., & Ulfah, N. (2024). Analisis Stilistika Slogan Kampanye Calon Presiden Republik Indonesia 2024. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 76–83. <https://doi.org/10.26499/bahasa.v6i1.979>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Sutarman, S., Saputra, A., & Abdussamad, Z. (2024). Unveiling Power: A Van Dijk Discourse Analysis of Prabowo's Presidential Inauguration Speech. *EDUMALSYS Journal of Research in Education Management*, 2(3), 211–219. <https://doi.org/10.58578/edumalsys.v2i3.4184>
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi dan Adaptasi Menuju Efisiensi dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 1-9.

- Voutilainen, E. (2023). Written representation of spoken interaction in the official parliamentary transcripts of the Finnish Parliament. *Frontiers in Communication*, 8. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2023.1047799>
- Wanjari, D. P., & Ahmad, S. (2025). Charisma as Rhetoric: The Invisible Grammar of Magnetic Public Speakers. *SMART MOVES JOURNAL IJELLH*, 13(9), 11–24. <https://doi.org/10.24113/smji.v13i9.11595>
- Zakiah, Z., Agnia, R., Handayani, H. S., Davika, Z., Ramdani, A., & M.Z Syafiq, M. Z. S. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.807>
- Zsazsa, C. S. K. M., & Nasution, R. (2023). Transformasi birokrasi di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 260-267.